



**Peraturan Desa Bunder
Nomor 2 Tahun 2020**

**Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa Bunder
Tahun 2020 - 2025**



**Pemerintah Desa Bunder
Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul**

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PATUK
DESA BUNDER

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNDER
DAN PEMERINTAH DESA BUNDER
TERHADAP PERATURAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUNDER
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DESA BUNDER

NOMOR : 2 TAHUN 2020

NOMOR : 2 TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Balai Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada musyawarah bersama antara Pemerintah Desa Bunder dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bunder menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Bunder tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Balai Desa Bunder dan ditandatangani bersama oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bunder dan Kepala Desa Bunder.

Ketua BPD DESA BUNDER



SUYADI



Kepala Desa Bunder

MARYADI



KEPALA DESA BUNDER KECAMATAN
PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BUNDER
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUNDER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bunder Tahun 2020-2025 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Bunder tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Bunder;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNDER
DAN
KEPALA DESA BUNDER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bunder.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Bunder dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bunder dibantu perangkat Desa Bunder sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Bunder yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa Bunder dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Bunder dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Bunder dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa (Musdes) adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
13. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di desa guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu.

17. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Kepala Desa, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum dan program kegiatan.
18. RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat;
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif;
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bunder Tahun 2020 – 2025 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJM-Desa ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) Masa pemerintahan Kepala Desa setelah tahun 2025 berkewajiban untuk menyusun RPJM-Desa periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Bunder
pada tanggal 30 Maret 2020



Diundangkan di Bunder
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DESA BUNDER,


SIDIK HERMAWAN

LEMBARAN DESA BUNDER TAHUN 2020 NOMOR 02

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	9
A.	Latar Belakang	9
B.	Maksud dan Tujuan	9
C.	Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
D.	Sistematik Penulisan RPJM-Desa	10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	12
A.	Kondidi Geografi	12
B.	Perekonomian Desa	13
C.	Sosial Budaya Desa	14
D.	Prasarana dan Sarana Desa	23
BAB III	VISI DAN MISI	24
A.	Filosofi	24
B.	Visi	25
C.	Misi	25
BAB IV	POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	29
A.	Potensi	29
B.	Masalah	35
C.	Strategi	38
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
A.	Arah Pengelolaan Keuangan Desa	41
B.	Arah Pengelolaan Belanja Desa	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	43
A.	Strategi Kebijakan	43
B.	Program dan Kegiatan Pembangunan	45
BAB VII	PENUTUP	46
A.	Program	46
B.	Kaidah Pelaksanaan	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai data perencanaan 6 (enam) tahunan, RPJM-Desa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Desa perlu menyusun data rencana pembangunan jangka menengah. Dalam Penyusunan data perencanaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan keterpaduan antara pembangunan di desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 yang berfungsi sebagai data perencanaan periode 6 (enam) tahun periode jabatan Kepala Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan yang menjadi arah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan. RKP-Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dengan memuat indikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, atau swadaya serta pembiayaan lainya seperti hibah dan program lain.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM-Desa ialah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keselarasan serta menyelaraskan program-program pembangunan di desa, sedangkan tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berkala;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya;
3. Menyajikan gambaran kondisi umum desa sekarang serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;

4. Memudahkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara tepat, terarah dan terukur.
- C. Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumem Perencanaan Lainnya
1. Hubungan RPJM-Desa dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

RPJM-Desa Bunder ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 2. Hubungan RPJM-Desa dengan RKP-Desa

Data RPJM-Desa yang disusun untuk perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2020 – 2025, ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) setiap tahunnya. Apabila suatu program pembangunan belum bisa terlaksana pada tahun pertama maka untuk tahun berikutnya terus diprogramkan hingga terealisasi. Dengan RPJM-Desa ini pula arah pembangunan untuk setiap tahunnya menjadi pasti. Begitu pula angka sumber pembiayaan dapat diarahkan untuk terlaksananya rencana pembangunan tersebut secara lebih tepat dan efisien.
 3. Sistematika Penulisan RPJM-Desa

Sistematika penulisan RPJM-Desa Bunder Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Hubungan RPJM-Desa dengan data Perencanaan lainnya
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - A. Kondisi Geografi
 - B. Perekonomian Desa
 - C. Sosial Budaya Desa
 - D. Prasarana dan Sarana Desa
 - BAB III VISI DAN MISI
 - A. Filosofi
 - B. Visi
 - C. Misi
 - BAB IV POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
 - A. Potensi
 - B. Masalah
 - C. Strategi
 - BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa
 - B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB VII PENUTUP

A. Program

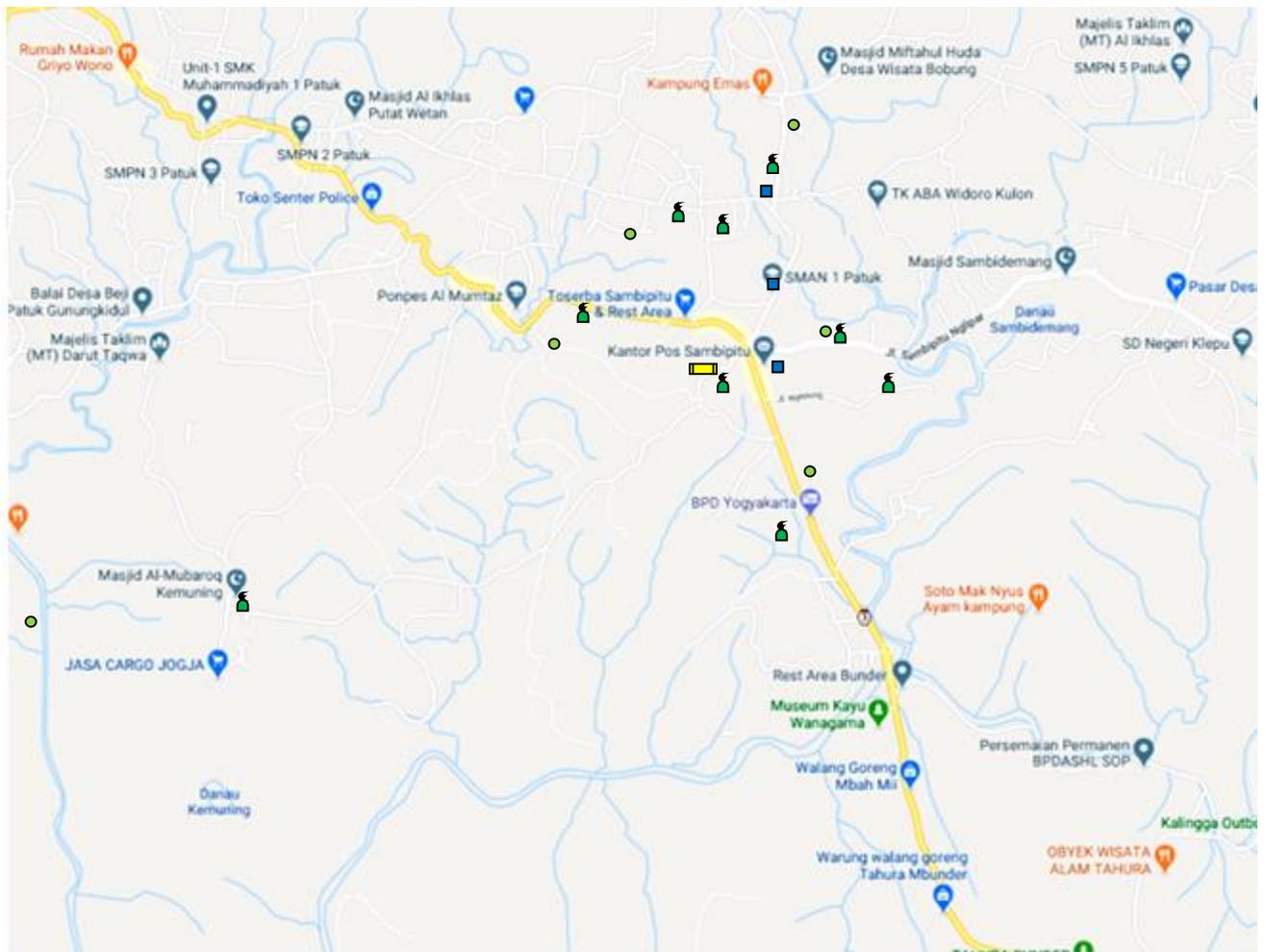
B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Kondisi Geografi

Desa Bunder adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Wilayah Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Bunder terletak disebelah Timur Kota Kecamatan Patuk. Jarak Desa Bunder dengan Ibu Kota Kecamatan \pm 7 Km dan 20 Km dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul.

PETA WILAYAH



KETERANGAN :

- : Balai Desa
- : Balai Padukuhan
- : Puskesmas
- : Sekolah
- : Masjid
- : Jalan Kabupaten
- : Jalan Desa
- : Batas Kabupaten
- : Batas Desa
- : Batas Padukuhan

Batas Wilayah Desa Bunder adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Putat
- Sebelah Selatan : Sungai Oyo

- Sebelah Barat : Desa Beji
- Sebelah Timur : Desa Nglegi

Kondisi topografis Desa Bunder secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Ketinggian tanah 650 m di atas permukaan laut.
- Kondisi tanah adalah dataran rendah.
- Banyaknya curah hujan per tahun 7,762 mm/tahun dengan jumlah rata-rata 80 hari; bulan basah berkisar antara 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan; musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober – Nopember dan berakhir pada bulan Maret - April setiap tahunnya; puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.
- Jumlah sungai di Desa Bunder ada 2 buah yang berada di Padukuhan Bunder dan Padukuhan Gambiran. Sumber air di Desa Bunder adalah sungai Oyo di Padukuhan Bunder.

B. Perekonomian Desa

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Desa Bunder cukup beragam, mulai dari tanah persawahan hingga perbukitan dengan segala kekayaan alamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Desa Bunder adalah sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Bunder adalah sebagian besar lahan kering tadah hujan (95 %) yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif kecil dan sebagian besar sawah tadah hujan. Adapun rincian lahan pertanian Desa Bunder adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Luas (ha)
1	Sawah tadah hujan	278,5321
2	Ladang tegalan	479,6661
3	Pekarangan	152,1248
4	Hutan milik warga masyarakat	17,7710
5	Perikanan	0,0910
6	Tanah kritis/tandus	13,2400

Lahan sawah yang dapat ditanami padi 2 kali dalam satu tahun adalah seluas kurang lebih 7 ha. Lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani padi-pala wija dengan pola tumpang sari.

2. Hutan

Hutan rakyat di Desa Bunder seluas kurang lebih 17,7710 ha yang berfungsi sebagai hutan produktif.

3. Flora dan fauna

Flora dan fauna yang ada di Wilayah Desa Bunder cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan.

Flora yang dapat dijumpai di Wilayah Desa Bunder dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Tanaman musiman antara lain meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan bermacam-macam polo pendem), serta sayur-sayuran (bayam, cabai, terong, mentimun dsb). Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, pisang, durian, rambutan, mangga, kelapa, klengkeng, rambutan dan kakao) serta kayu-kayuan (jati, sono keling, mahoni, sengan laut, sengan jowo dan bambu).

Fauna darat dan udara yang ada di Wilayah Desa Bunder pada saat ini antara lain burung puyuh, pipit, kutilang, ayam, bebek, mentok, angsa dsb)

Fauna air yang ada adalah nila, gurame. lele, mujair, dsb. Selain itu terdapat jenis populasi ternak yaitu sapi kurang lebih 1.260 ekor, ayam kampung kurang lebih 4.000 ekor, bebek 500 ekor, mentok 300 ekor, kambing kurang lebih 1.100 ekor, angsa kurang lebih 100 ekor.

4. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah yang ada di Wilayah Desa Bunder kurang lebih 170 pelaku usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari kelompok dan individu. Jenis usahanya terdiri dari pengolahan kayu, konfeksi dan makanan olahan. Industri mikro kecil dan menengah ini berbasis pada hasil pertanian dan hasil berkebunan.

C. Sosial Budaya Desa

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bunder pada akhir tahun 2019 adalah 3.440 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 1.078 KK. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, penduduk Desa Bunder menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	1.627
2	Perempuan	1.813
	Jumlah	3.440

Data penduduk berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut :

No	Padukuhan	0-5 Tahun	6-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	> 18 Tahun	Jumlah
1	KEMUNING	16	24	28	33	272	373
2	WIDORO KULON	18	28	21	37	475	579

3	NGEPUNG	18	22	22	36	375	473
4	BUNDER	14	57	40	59	515	685
5	WIDORO WETAN	21	38	31	33	373	496
6	PLOSOKEREP	19	33	58	39	359	508
7	GAMBIRAN	12	25	20	31	238	326
	JUMLAH	118	227	220	268	2.607	3.440

Data tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2019 di Desa Bunder adalah sebagai berikut:

No	Pedukuhan	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra PKS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	
1	KEMUNING	10	20	58	21	2	111
2	WIDORO KULON	26	27	76	12	4	145
3	NGEPUNG	6	10	72	14	3	105
4	BUNDER	42	6	39	11	2	100
5	WIDORO WETAN	7	18	99	10	3	137
6	PLOSOKEREP	4	17	116	7	5	149
7	GAMBIRAN	3	10	75	8	3	99
	JUMLAH	91	108	535	83	22	846

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa berjumlah 14 orang, yang terdiri dari : 1 Sekretaris Desa 2 Kepala Seksi, 3 Kepala Urusan 5 Dukuh dan 3 Staf Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perangkat	Jabatan	Pendidikan
1	MARYADI	Kepala Desa	SMA
2	SIDIK HERMAWAN, S.Pd.I.	Sekretaris Desa	S1
3	WIDODO	Kasi. Pemerintahan	SMA
4	ATIK ALFIAH S.Pd.	Kasi. Kesejahteraan	S1
5	-	Kasi. Pelayanan	-
6	WAHYU SETIAWAN	Kaur. Tata Usaha dan Umum	SLTA
7	SITI NUR WIJAYANTI, SE	Kaur. Keuangan	S1
8	SUHERMAN	Kaur. Perencanaan	SMA
9	SUHARDI	Dukuh Kemuning	SMP
10	SUGIYANTO	Dukuh Widoro Kulon	SMP
11	-	Dukuh Ngepung	
12	-	Dukuh Bunder	
13	WIJI KUSUMO	Dukuh Widoro Wetan	SMA
14	JUMBIDI	Dukuh Plosokerep	SMP
15	SAGIYEM	Dukuh Gambiran	SMP
16	SUPRAPTO	Staf Kaur. TU dan Umum	SMA

17	ESTI SETIANINGSIH, A.Md	Staf Kasi Pemerintahan	D3
18	ARIS MINTARJO	Staf Kasi Pelayanan	SMA

Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 2 Kepala Bidang (Kabid) dan 4 anggota. Susunan BPD BUNDER adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	SUYADI	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	YUDHISTIRA ADHI N	Wakil Ketua	Karang Taruna
3	YENI LESTARI	Sekretaris	Perempuan
4	PARDIMAN	Kabid Pemerintahan	Tokoh Masyarakat
5	EDY PRAMUDIYA	Kabid Pembangunan	Tokoh Masyarakat
6	ISNA SHOLIHAH	Anggota	Tokoh Agama
7	SULAMTA	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	ANIS MAWARNI	Anggota	Karang Taruna
9	RINA WATI	Anggota	Tokoh Masyarakat

3. Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat 6 (enam) lembaga yang wajib ada di desa, 5 (lima) lembaga dengan masa jabatan pengurusnya selama 6 (enam) tahun yaitu : LPMD, PKK, RW, RT dan LPMP dan 1 (satu) lembaga masa jabatan pengurusnya 3 (tiga) tahun yaitu Karang Taruna.

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

LPMD merupakan salah satu dari 6 lembaga wajib yang harus ada di desa yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain itu tugas LPMD ialah menggerakkan dan menggali partisipasi aktif serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa. Keanggotaan dan kepengurusan LPMD Bunder adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	MARIYEM	Ketua	Ngepung
2	SURANTO	Wakil Ketua	Ngepung
3	SYUKRI FATHANI	Sekretaris I	Plosokerep
4	TRI HARMANTO	Sekretaris II	Gambiran
5	AGUNG KRISTIYO	Bendahara	Gambiran
6	MUHARI	Koord.Sie.Praswil	Widoro kulon
7	MUDJAMRONI	Koord.Sie.Perekonomian	Widoro wetan
8	JOKO SUGIYANTO	Koord.Sie.Kamtib	Widoro kulon
9	SULISTYOWATI	Sie.Pembr. Perempuan	Bunder
10	SUYANTO	Sie.Pemuda dan ORKES	Bunder

11	HARYONO	Sie.Kesejahteraan Rakyat	Kemuning
----	---------	--------------------------	----------

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMD Bunder antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Menggali swadaya murni masyarakat desa untuk mengimbangi bantuan.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbangdesa.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa baik berupa kegiatan swakelola dan pembangunan swadaya murni masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Peran dan fungsi PKK dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan di pedesaan sangat penting. Sehingga kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan kaum laki-laki. Kegiatan PKK Desa BUNDER selama ini melalui kegiatan PKK antara lain:

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Desa setiap tanggal 9.
- Posyandu di masing-masing pedukuhan.
- Pertemuan dengan kader rutin bulanan setiap tanggal 9.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Kursus kesetaraan gender.
 - Seminar penanggulangan KDRT.
 - UU Perlindungan anak.
 - Kursus ketrampilan

Kepengurusan PKK Desa Bunder adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUDARMI	Ketua	Plosokerep
2	MURWANINGSIH	Wakil Ketua I	Widoro kulon
3	AGNES HERMIN	Wakil Ketua II	Widoro wetan
4	ENDANG SITI NURJANAH	Wakil Ketua III	Plosokerep
5	SITI ROMELAH	Wakil Ketua IV	Kemuning
6	YATINI	Sekretaris I	Plosokerep
7	SETYO RINI	Sekretaris II	Widoro wetan
8	SULISTYOWATI	Bendahara I	Bunder
9	SRI WAHYUNINGSIH	Bendahara II	Kemuning
10	DARTIK	Pokja I	Plosokerep

11	SRI WINDARTI	Anggota	Widoro wetan
12	RUBIYEM	Anggota	Ngepung
13	TINA PURWANTI	Anggota	Widoro kulon
14	NURMILAH	Anggota	Plosokerep
15	SUWASNI	Pokja II	Bunder
16	NGATIRAH	Anggota	Ngepung
17	NURWANTI	Anggota	Gambiran
18	NINIK UMIYATI	Anggota	Ngepung
19	SAGIYEM	Anggota	Gambiran
20	RUMIYATI	Pokja III	Kemuning
21	GIYANTI	Anggota	Bunder
22	NGATIYAH	Anggota	Bunder
23	SURATINAH	Anggota	Bunder
24	ENDANG WINARSIH	Anggota	Kemuning
25	KARTINI	Pokja IV	Widoro kulon
26	LIA HEMALIA	Anggota	Gambiran
27	NGATINI	Anggota	Widoro wetan
28	TUMINEM	Anggota	Widoro wetan
29	LILIK WAHYUNINGSIH	Anggota	Plosokerep

KARANG TARUNA

Peran dan fungsi karangtaruna dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum remaja dan pemuda di pedesaan sangat penting. Sehingga kaum remaja sebagai generasi muda calon penerus bangsa harus memiliki kegiatan, semangat dalam rangka pemberdayaan khususnya generasi muda. Kegiatan karangtaruna Persada Desa Bunder selama ini antara lain :

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Desa.
- Mengadakan pertemuan dengan karangtaruna sub Padukuhan.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Pembinaan tentang bahaya narkoba
 - Pelatihan dan pendampingan TPA
 - Pendampingan dan Literasi
 - Pembinaan tentang hukum.

Kepengurusan Karang Taruna Desa Bunder Periode 2020 – 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	CAHAYA PENAKA BULAN	Ketua	Widoro kulon
2	RENDHY AJIB N.	Wakil Ketua	Widoro wetan
3	ANISA HERDANINGTYAS	Sekretaris	Plosokerep
4	DEDY SUPRIYADI	Wakil Sekretaris	Kemuning
5	MUJI WARSITO	Bendahara	Bunder
6	YOGA PANGESTU	Wakil	Widoro kulon

		Bendahara	
7	YUSUF MANTORO	Koord. Seksi Diklat	Widoro wetan
12	ARYO PAMBUDI	Koord. Seksi Usaha Kesos	Widoro wetan
17	ANGGIT	Koord. Seksi Kube	Widoro kulon
22	HENDRI WIJAYA	Koord. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	Plosokerep
26	ROZAN ALTAF HAZIMI	Koord. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya	Ngepung
32	SUBARDI	Koord. Seksi Lingkungan Hidup	Gambiran
35	UTIK RAHMAWATI	Koord. Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan	Plosokerep

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

RW dan RT merupakan salah satu dari lembaga wajib yang harus ada di desa yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembinaan kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan wilayahnya serta penggerak swadaya dan gotong royong masyarakat.

Data personalia lembaga itu sebagai berikut :

Data RW dan RT Desa BUNDER

No	Padukuhan	RT		RW	
		Nama	Ketua	Nama	Ketua
1	KEMUNING	SUYONO	001	SUHARTOYO	001
		HERI HERMANTO	002		
		EDI SUWASONO	003		
		SUPARMIN	004		
2	WIDORO KULON	SUTRIYATNA	005	SUMARNO	002
		DIRJO MULYONO	006		
		WAHYUDI	007		
		MUADIRI	008		
3	NGEPUNG	PURWADI	009	BUDI WINOTO	003
		EKO SUTOPO	010		
		KARYANTO	011		
		NGATIYAH	012		

4	BUNDER	KARDIYA SULAMTA SUYADI PRAPTIYANA	013 014 015 016	MADIYONO	004
5	WIDORO WETAN	SUPRIYADI SUPRIYANTO SUPRIYADI TEGUH WIYONO	017 018 019 020	SURADIYANA	005
6	PLOSOKEREP	SIRAT PAYAMAN JOKO SASMITO SURADI KARJIYO	021 022 023 024	WIDODO	006
7	GAMBIRAN	SUYANTA RUBIMIN KAMIJO SARIJAN	025 026 027 028	SUKIMAN	007

LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMD merupakan lembaga yang berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat Padukuhan.

Keanggotaan dan kepengurusan LPMP di Desa BUNDER adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	ADI SURATNO	KEMUNING	Ketua
2	AMIN ROHMADI	WIDORO KULON	Ketua
3	AGUS MURWANTO HADI	NGEPUNG	Ketua
4	H. NGATIMIN	BUNDER	Ketua
5	MUDJAMRONI	WIDORO WETAN	Ketua
6	INDRO SUBARJO	PLOSOKEREP	Ketua
7	PAIDI	GAMBIRAN	Ketua

4. Ketenagakerjaan

Dari seluruh jumlah penduduk Desa Bunder yang berjumlah 3.440 jiwa, yang usia produktif (15-56 tahun) berjumlah 2.875 jiwa atau 67% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	2.875	orang
2	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun yang bekerja	2.748	orang
3	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun yang tidak bekerja	35	orang
4	Penduduk wanita usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	92	orang
5	Penduduk >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	-	orang
6	Penduduk >15 tahun cacat dan bekerja	-	orang

7	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :		
	1) PNS	48	orang
	2) TNI/Polri	14	orang
	3) Kepala Desa/ Perangkat Desa	15	orang
	4) Petani/ Pekebun	1.985	orang
	5) Swasta	686	orang

5. Pendidikan

Perkiraan tentang angka penduduk Desa Bunder yang telah berhasil mengenyam/lulus pendidikan sekolah formal hingga tahun 2019 ialah sebagai berikut :

No	Padukuhan	Buta Huruf	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D I	D II	D III	S 1	S 2	Jumlah
1	KEMUNING	10	15	80	53	48	-	1	2	3	-	212
2	WIDORO KULON	15	13	81	72	57	-	1	2	5	-	246
3	NGEPUNG	15	21	75	61	59	-	1	2	1	1	235
4	BUNDER	17	19	65	59	63	1	2	1	2	-	229
5	WIDORO WETAN	7	26	90	85	59	2	2	1	5	1	277
6	PLOSOKEREP	4	38	111	134	77	1	3	3	8	1	379
7	GAMBIRAN	6	21	82	73	69	2	-	3	2	-	258
	JUMLAH	74	251	1.024	1.143	640	12	17	23	44	3	3.231

Prasarana pendidikan yang ada di Desa Bunder terdiri dari PAUD jumlah 3, Taman Kanak-kanak (TK) jumlah 1, Sekolah Dasar (SD) jumlah 2, SMA jumlah 1.

6. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat Desa Bunder dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya kesehatan masyarakat.

Data tentang kesehatan masyarakat Desa Bunder antara lain sebagai berikut :

No	Indikator Kesehatan	Angka
1	Kematian bayi	Tidak ada
2	Kematian kasar	Tidak ada
3	Penderita Anemia ibu hamil	Tidak ada
4	Penderita Anemia balita	Tidak ada
5	Penderita kurang energi kronis	Tidak ada
6	Status gizi masyarakat di Desa	Cukup

7. Peribadatan

Dari jumlah penduduk Desa Bunder berjumlah 3.440 jiwa semua beragama Islam, data prasarana ibadah yang ada dengan rincian sebagai berikut :

No	Prasarana Ibadah/Masjid	Alamat	Ketua Takmir
1	Al Mubarak	Kemuning	Suroto
2	Nurul Iman	Kemuning	Lasiyo
3	At Taqwa	Widoro kulon	Istiqori
4	Ar Rahman	Widoro kulon	Sukarjiyo
5	Al Jami'ah	Widoro wetan	Widodo
6	Al Mukhlisin	Bunder	Kardjiyo
7	Al Mujahidin	Bunder	Pardiyo
8	Al Muhajir	Bunder	Hasyim
9	Baitul Iman	Bunder	Ngatimin
10	Al Ikhsan	Ngepung	Warsidi
11	Al Falaq	Plosokerep	Kasiyan
12	Al Karimah	Plosokerep	Suherman
13	Al Ikhlas	Gambiran	Judik
14	Al Hidayah	Gambiran	Sukiman
	MUSHOLA		
1	As-Shirot	Ngepung	Singgih Mulyana

D. Prasaran dan Sarana Desa

1. Transportasi, Jalan, Jembatan

Prasarana Transportasi yang ada di Desa Bunder jalan Kabupaten dan jalan Desa serta jalan Padukuhan (lingkungan) yang menghubungkan antara Desa Putat, Nglegi, Beji, serta jalan antar Padukuhan di Wilayah Desa Bunder, dan panjang jalan Kabupaten kurang lebih 8 km dan panjang jalan desa 30,672 km aspal kurang lebih 9,791 km, panjang jalan rabat kurang lebih 16,767 km, panjang jalan perkerasan batu kurang lebih 1,200 km serta panjang jalan tanah kurang lebih 2,914 km.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Bunder dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yaitu :

Kepala Desa sebagai pimpinan, dibantu Perangkat Desa yang terdiri :

1. Sekretariat yang dikepalai Sekretaris Desa, yang membawahi :

- 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
- 2) Urusan Keuangan;
- 3) Urusan Perencanaan;

2. Pelaksana teknis yang terdiri dari :

- 1) Seksi Pemerintahan;
- 2) Seksi Kesejahteraan;
- 3) Seksi Pelayanan;

3. Unsur Wilayah terdiri dari : Dukuh

4. Staf Perangkat Desa.

3. Sarana Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan di Desa Bunder telah terbentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap Padukuhan yang siap setiap saat dapat memberikan informasi dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang selalu siap dalam melayani/membantu masyarakat serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

BAB III VISI DAN MISI

A. Filosofi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki pandangan luas dan dapat menjadi pedoman dan tujuan bagi Desa dalam menetapkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan.

Filosofi pembangunan Desa Bunder merangkum filosofi daerah Kabupaten Gunungkidul yang digali dari khasanah budaya luhur bangsa Indonesia yaitu DHAKSINARGA BHUMIKARTA. *Dhaksinarga* berasal dari kata-kata *Dhaksina* yang berarti “Selatan” dan *Arga* yang berarti “Gunung”, yang kemudian dirangkai menjadi satu kata *Dhaksinarga* yang artinya Gunungkidul. *Bhumikarta* berasal dari kata-kata *Bhumi* yang bermakna “bumi, tanah, daerah” dan *Karta* yang bermakna “Subur, makmur, rahayu, damai dan sejahtera”.

Dengan demikian filosofi pembangua Kabupaen Gunungkidul, DHAKSINARGA BUMIKARTA, merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan Hasta Dharma.

Adapun Hasta Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

- (1) Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan aliran dan agama,
- (2) Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum,
- (3) Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin,
- (4) Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif dan korektif,
- (5) Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju kearah kesejahteraan masyarakat,
- (6) Bersifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana agar dapat menampung dan mencarikan penjelasan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari,
- (7) Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dan
- (8) Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil, dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan di dalam kebaikan lahir, batin bagi masyarakat.

B. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) BUNDER Tahun 2020 – 2025 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Desa BUNDER 2019 yang telah diperbarui, yaitu :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT BUNDER YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan atau mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Desa BUNDER yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

“*Bermartabat*” adalah kondisi yang diharapkan terbentuknya masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Bermartabat juga suatu tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku ramah dan masyarakat yang memiliki sopan santun, taat atau dan saling bermitra dengan orang lain. Bermartabat juga bermakna berkarakter, percaya diri dimana kondisi psikologis masyarakat yang merasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggungjawab, rasa percaya diri karena memiliki sifat jujur, visioner, kerja sama, peduli dalam mencapai masyarakat yang sejahtera.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

C. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Desa 2020 – 2025, yaitu :

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan mengedepankan kerjasama secara harmonis dengan BPD dan Lembaga Desa;

- 2) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
- 3) Menciptakan dunia usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;
- 4) Menciptakan tata kelola administrasi yang baik khususnya di bidang kepemilikan status tanah dan pajak tanah;
- 5) Menciptakan terobosan kegiatan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan desa baik pembangunan jalan, jembatan, pergedungan dan pariwisata;
- 6) Meningkatkan pengajian agama dan kepercayaan lain agar menambah iman dan taqwa;
- 7) Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- 8) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Mengangkat potensi lokal baik seni dan kebudayaan serta pariwisata milik desa;

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Pertama

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan yang selaras, sejalan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga Desa

Misi Kedua

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 tahun, penyediaan fasilitas yang memadai, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan pelatihan bagi kader kesehatan dan pembangunan manusia serta pemberian insentif dan peningkatan kegiatan kepemudaan dibidang olahraga.

Misi Ketiga

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder untuk mewujudkan kemandirian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dengan cara pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan bagi kelompok serta pemberian stimulan modal.

Misi keempat

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder untuk menertibkan administrasi dalam status kepemilikan tanah serta pembayaran pajak yang tertib

Misi Kelima

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang

ekonomi dan pembangunan dengan bekerjasama pada perusahaan atau pengusaha yang ada di Desa Bunder.

Misi keenam

Merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder dalam meningkatkan iman dan taqwa masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya yang meliputi pelaksanaan pengajian, pemberian insentif, pelaksanaan perayaan hari besar keagamaan, pembinaan kelompok agama.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat desa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Perangkat Desa dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedelapan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal yang meliputi pelayanan masyarakat dalam hal administrasi umum, kependudukan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Misi Kesembilan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Bunder dalam mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap memegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya serta mampu mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali potensi wisata yang ada yang meliputi peningkatan pengelolaan wisata atau kelompok dengan pembangunan sarana prasarana pendukung wisata serta bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan wisata.

Selanjutnya kesembilan misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Desa Bunder sebagai berikut :

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan dan meningkatkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan mengedepankan kerjasama secara harmonis dengan BPD dan Lembaga Desa;	Mewujudkan dan meningkatkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan mengedepankan kerjasama secara harmonis dengan BPD dan Lembaga Desa untuk pelaksanaan program pemerintah desa;
2	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang	Terwujudnya sumber daya masyarakat yang unggul dalam

	pendidikan, kesehatan, dan olahraga;	bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3	Menciptakan dunia usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;	Menciptakan dunia usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
4	Menciptakan tata kelola administrasi yang baik khususnya di bidang kepemilikan status tanah dan pajak tanah;	Menciptakan tata kelola administrasi yang baik khususnya di bidang kepemilikan status tanah dan pajak tanah yang tertib;
5	Menciptakan terobosan kegiatan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan desa baik pembangunan jalan, jembatan, pergedungan dan pariwisata;	Menciptakan terobosan kegiatan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan desa baik pembangunan jalan, jembatan, pergedungan dan pariwisata untuk peningkatan pendapatan asli desa;
6	Meningkatkan pengajian agama dan kepercayaan lain agar menambah iman dan taqwa;	Meningkatkan pengajian agama dan kepercayaan lain agar menambah iman dan taqwa dalam pengamalan dan ibadah;
7	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing agar pelayanan masyarakat yang optimal;
8	Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;	Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat;
9	Mengangkat potensi lokal baik seni dan kebudayaan serta pariwisata milik desa;	Mengangkat potensi lokal baik seni dan kebudayaan serta pariwisata milik desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat lokal.

BAB IV
POTENSI, MASALAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Gambaran umum kondisi Desa Bunder berdasarkan hasil pengkajian Desa secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi-potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa BUNDER. Adapun program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Bunder.

A. Potensi

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun manusia secara umum yang ada di Desa Bunder adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Bunder 943,8912 ha atau 9,44 km²
2. Jumlah Penduduk tahun 2019 sejumlah 3.440 jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 59 th) berjumlah 67 % (1.737) yang merupakan potensi tenaga kerja.
3. Potensi pertanian termasuk di dalamnya peternakan, perikanan darat dan perkebunan.
4. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan kayu serta pengolahan hasil pertanian yang berbentuk makanan olahan.
5. Letak wilayah yang sangat indah untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.
6. Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan hidup hemat.

Disamping itu hasil pengkajian desa secara partisipatif menunjukkan informasi tentang potensi-potensi Desa BUNDER yang lebih rinci sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN POTENSI
1. Transaksi/ Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padukuhan Bunder, Gambiran, Widoro wetan terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 2. Di tujuh padukuhan tersebut sebagian sawahnya masih dapat ditanami 2 kali dalam satu tahun. 3. Dan sebagian besar masih menggunakan sistem tadah hujan. 4. Disamping itu para petani menanam rumput kalanjana/gajah/sentaria di pematang sawah untuk pakan ternak dan pada musim kemarau sawah-sawah sebagian besar ditanami kacang hijau dan sayur-sayuran. 5. Untuk ladang/tegalan dimanfaatkan para

	<p>petani untuk ditanami ketela dan palawija yang sesuai dengan keadaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dilingkungan rumah pekarangan ditanami kakao yang hasilnya cukup memuaskan para petani. 7. Hasil dari hutan rakyat tersebut di gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari serta dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan kayu bakar. 8. Jalan yang menghubungkan antar padukuhan sebagian besar telah diperkeras (aspal, rabat beton dan batu). Namun pada saat ini jalan aspal Kabupaten (Jalan Kabupaten) rusak belum ada pembangunan atau rehab dari dinas terkait. 9. Pada musim kemarau sebagian masyarakat menggunakan SPAM sumber mata air dari sungai Oya yang terletak di Padukuhan Bunder. 10. Sebagian besar penduduk Desa Bunder bermata pencaharian sebagai petani yang sebagian kecil sebagai buruh tani dan bangunan, pedagang, dan kuli bangunan. 11. Tingkat pendidikan warga Desa Bunder kebanyakan adalah SMP dan SMA. 12. Disamping pertanian, sebagian penduduk beternak sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. 13. Prasarana pendidikan formal adalah 2 SD Negeri yaitu SD Bunder I dan SD Bunder III, 1 SMA yaitu SMA 1 Patuk. 14. Prasarana Ekonomi terdapat kios Desa dan BUM Desa. 15. Sarana Kesehatan terdapat Puskesmas Pembantu I di Padukuhan Bunder, dan Klinik Kesehatan Swasta Kurnia Husada.
2. Kalender Musim	<p><i>Musim Kemarau (bulan Mei – November)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan pupuk kandang (kompos) 2. Petani membuat arang untuk kebutuhan sehari-hari 3. Tenaga kerja keluar daerah untuk menambah penghasilan 4. Petani menjual kayu bakar 5. Petani menjual hasil bumi seperti kedelai, singkong, kakao dan pisang 6. Petani menjual sayur-sayuran 7. Petani menjual buah-buahan dsb.

	<p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan lahan pertanian 2. Petani mulai menanam jagung, kacang, singkong, kedelai dan padi 3. Petani mulai pemupukan tanaman pertanian 4. Petani menuai hasil pertaniannya 5. Petani menyetok hasil pertaniannya. 6. Buruh tani berkonsentrasi dalam mengerjakan pertaniannya.
<p>3. Peta Sketsa Desa</p>	<p><i>Padukuhan Kemuning</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air berasal dari SPAM 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, kayu putih, kayu secang) 3. Buah-buahan terdapat manga. 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam. 6. Pertanian juga terdapat lahan ladang 7. Mata Pencaharian kebanyakan petani dan ada pedagang, PNS. 8. Jumlah Penduduk : 321 jiwa dan terdiri dari 42 KK. <p><i>Padukuhan Widoro Kulon</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air dari sumber mata air dari sumur dan SPAM. 2. Buah-buahan terdapat rambutan, kakao, pisang, petai dan manga 3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 4. Peternakan terdapat peternakan sapi, ayam, bebek dan kambing 5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 6. Mata pencaharian kebanyakan adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada PNS. 7. Jumlah Penduduk : 600 jiwa dan terdiri dari 74 KK <p><i>Padukuhan Ngepung</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air dari sumber mata air dari sumur dan SPAM. 2. Buah-buahan terdapat rambutan, kakao, pisang, petai dan manga 3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)

	<p>4. Peternakan terdapat peternakan sapi, ayam, bebek dan kambing</p> <p>5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang</p> <p>6. Mata pencaharian kebanyakan adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada PNS.</p> <p>9. Jumlah Penduduk : 403 jiwa dan terdiri dari 34 KK</p> <p><i>Padukuhan Bunder</i></p> <p>1. Sumber air dari sumber mata air dari sumur dan SPAM</p> <p>2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, leresede, kayu putih, mahoni dsb)</p> <p>3. Buah-buahan terdapat rambutan, pisang dan manga</p> <p>4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll.</p> <p>5. Peternakan terdapat peternakan sapi, ayam dan kambing</p> <p>6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan lading</p> <p>7. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang ada PNS</p> <p>8. Jumlah Penduduk : 713 jiwa dan terdiri dari 92 KK</p> <p><i>Padukuhan Widoro Wetan</i></p> <p>1. Sumber mata air dari sumber mata air sumur dan SPAM</p> <p>2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, mahoni dsb)</p> <p>3. Buah-buahan terdapat rambutan, manga, dan pisang.]</p> <p>4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)</p> <p>5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam.</p> <p>6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan lading</p> <p>7. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang</p> <p>8. Jumlah Penduduk : 477 jiwa dan terdiri dari 44 KK</p> <p><i>Padukuhan Plosokerep</i></p> <p>1. Sumber air dari sumber mata air dan belik, sumur dan SPAM.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Buah-buahan terdapat rambutan, manga, pisang, kakao, klengkeng, papaya, jambu dan durian. 3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll) 4. Peternakan terdapat peternakan sapi, ayam petelur, puyuh, kambing dan ikan air tawar 5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 6. Tanaman Kakao (coklat) 7. Mata pencaharian adalah petani, pegawai swasta, sopir, buruh, sebagaian PNS 8. Jumlah Penduduk : 483 jiwa dan terdiri dari 104 KK <p><i>Padukuhan Gambiran</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber mata air dari sumber mata air dari belik, sumur, SPAM 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, manga, pisang. 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, ayam dan kambing 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata pencaharian adalah petani , buruh, pedagang, pengusaha. 8. Jumlah Penduduk : 402 jiwa dan terdiri dari 84 KK
4. Bagan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bunder organisasi/lembaga yang aktif dan mempunyai peran terhadap masyarakat adalah RT/RW, LPMP, LPMD, PKK, Karang Taruna, LINMAS, BUMDesa beserta Pemerintah Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

B. Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Bunder yang perlu ditangani segera adalah sebagai berikut :

1. Dari 199 Keluarga Pra KS dan KS I yang perlu penanganan serius untuk pengentasan kemiskinan.
2. Air bersih, yang pada musin kemarau masih kesulitan air juga perlu penanganan yang tidak kalah pentingnya.
3. Lahan persawahan yang menggantungkan pada curah hujan.

4. Pakan ternak yang pada musim kemarau sangat sulit perlu ada solusi.
5. Perikanan darat juga perlu adanya pemecahan untuk meningkatnya budi daya ikan.
6. Tingkat Pendidikan yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarana serta penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.
7. Prasarana infrastruktur terutama jalan-jalan yang masih banyak yang rusak perlu bantuan dan penanganan yang segera dilakukan.
8. Tukar guling Tanah Desa dengan Perseorangan yang belum tuntas (Tanah Balai Desa).
9. Pertanahan yang masih banyak belum bersertifikat sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya pensertifikatan.
10. Kamtibmas perlu adanya penanganan, terutama LINMAS yang kemampuannya kurang maksimal/ profesional.
11. Sampah rumah tangga yang semakin hari semakin sulit ter tangani, karena pola hidup masyarakat yang semakin banyak bergantung pada produk yang sulit untuk di daur ulang dan kesadaran menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rendah.

Disamping itu hasil pengkajian desa secara partisipatif menunjukkan informasi tentang masalah-masalah yang ada di Wilayah Desa Bunder dengan rincian sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN MASALAH
1. Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih hampir disemua padukuhan pada musim kemarau masih banyak warga yang kekurangan, sehingga harus beli/minta bantuan. 2. Persawahan di musim kemarau kebanyakan kering tidak dapat ditanami karena tidak ada irigasi dan sungai kering. 3. Kesuburan tanah sawah maupun ladang menurun setelah petani menggunakan pupuk kimia. 4. Hama tanaman seperti tikus, wereng, walang, sundep dan ulat menjadi tantangan para petani. 5. Peternakan juga banyak tantangan karena hama ces (mulut berair) bagi peternak ayam. 6. Jalan-jalan aspal ditiap padukuhan banyak yang sudah rusak. 7. Jalan masuk kerumah-rumah/gang masuk banyak tanah sehingga pada musim hujan jalan becek. 8. Pasar desa yang belum maksimal dari segi sarana dan prasarana serta aktifitas perdagangan yang terbatas dan tidak setiap

	<p>hari sehingga para petani untuk menjual hasil pertanian harus ke pasar yang cukup jauh.</p> <p>9. Peternakan ayam ras juga menimbulkan masalah karena mengakibatkan bau yang tidak sedap juga lalat.</p> <p>10. Batas tanah banyak masalah karena belum semuanya disertifikat.</p>
<p>2. Peta Sketsa Desa</p>	<p><i>Padukuhan Kemuning</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbatu 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah kekeringan <p><i>Padukuhan Widoro Kulon</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sawah kebanyakan kering pada musim kemarau 2. Kurangnya lapangan kerja 3. SDM rendah 4. Kurangnya sumber pakan ternak pada musim kemarau 5. Ancaman tanah longsor <p><i>Padukuhan Ngepung</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanahnya berbukit 2. Tanah padas putih 3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah <p><i>Padukuhan Bunder</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman banjir <p><i>Padukuhan Widoro Wetan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar

	<p>4. Kurangnya lapangan kerja</p> <p>5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau</p> <p>6. SDM rendah</p> <p><i>Padukuhan Plosokerep</i></p> <p>1. Air berkurang pada musim kemarau</p> <p>2. Tanahnya padas putih</p> <p>3. Kurangnya lapangan kerja</p> <p>4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau</p> <p>5. SDM rendah</p> <p>6. Ancaman tanah kekeringan</p> <p><i>Padukuhan Gambiran</i></p> <p>1. Tanahnya berbukit</p> <p>2. SDM rendah</p> <p>3. Ancaman kekeringan</p>
<p>3. Kalender Musim</p>	<p><i>Musim Kemarau (bulan Mei – Nopember)</i></p> <p>1. Kekurangan air</p> <p>2. Harga jual singkong rendah</p> <p>3. Kekurangan pakan ternak</p> <p>4. Harga jual ternak murah</p> <p>5. Harga jual buah-buahan murah dsb.</p> <p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <p>1. Harga benih mahal</p> <p>2. Pupuk sulit didapat dan harganya mahal</p> <p>3. Penjualan hasil pertanian murah</p> <p>4. Sulit mengeringkan hasil panen</p> <p>5. Transportasi hasil panen sulit</p>
<p>4. Bagan Kelembagaan</p>	<p>1. Karang Taruna tingkat Desa belum optimal dalam perannya sebagai wadah generasi muda.</p> <p>2. Keberadaan LPMD dan LPMP juga belum berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.</p> <p>3. RW dirasakan tidak ada fungsinya karena perannya sama dengan Dukuh.</p>

Peluang yang sangat besar untuk mengurangi permasalahan di Desa Bunder adalah :

1. Peran serta masyarakat dan kesadarannya dalam bergotong-royong dan berswadaya masih tinggi sehingga dalam melaksanakan pembangunan di tingkat RT, Padukuhan maupun Desa sangat baik.
2. Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan lembaga yang ada cukup harmonis.

3. Partisipasi Perusahaan yang ada di Wilayah Desa Bunder cukup mendukung dalam melaksanakan program pembangunan.

C. Strategi

Strategi merupakan tujuan umum, sasaran dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta berpikir yang melatar belakangi upaya-upaya pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengedepankan potensi.

Berdasarkan Misi dan Tujuan di atas, stragei-stragi RPJM-Desa Bunder berikut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kemampuan desa, serta memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat maupun pihak-pihak lain yang berkomitmen terhadap pembangunan Desa Bunder.

Berikut adalah penjabaran Tujuan menjadi Strategi-strategi Pembangunan :

TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	Mewujudkan dan meningkatkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan mengedepankan kerjasama secara harmonis dengan BPD dan Lembaga Desa untuk pelaksanaan program pemerintah desa;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola 2. Menjalin komunikasi yang baik
2	Terwujudnya sumber daya masyarakat yang unggul dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan buta aksara 2. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Pelaksanaan kegiatan olahraga
3	Menciptakan dunia usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan 2. Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk kelompok usaha 3. Penerapan teknologi tepat guna 4. Pengembangan jaringan pasar
4	Menciptakan tata kelola administrasi yang baik khususnya di bidang kepemilikan status tanah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi masalah adiminstrasi pertanahan 2. Mengoptimalkan kesadaran masyarakat tentang

	pajak tanah yang tertib;	pentingnya administrasi pertanahan serta pembinaan masyarakat tentang pembayaran pajak tepat waktu
5	Menciptakan terobosan kegiatan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan desa baik pembangunan jalan, jembatan, pergedungan dan pariwisata untuk peningkatan pendapatan asli desa;	Meningkatkan potensi dan kemampuan peran/menjalin hubungan kerjasama serta pemerintah dan pihak lain untuk menunjang pembangunan
6	Meningkatkan pengajian agama dan kepercayaan lain agar menambah iman dan taqwa dalam pengamalan dan ibadah;	Meningkatkan perilaku Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan masyarakat desa lebih agamis
7	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing agar pelayanan masyarakat yang optimal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Meningkatkan kemampuan Kepala desa dan Perangkat Desa dalam menggunakan teknologi
8	Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan waktu pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi yang lebih efektif
9	Mengangkat potensi lokal baik seni dan kebudayaan serta pariwisata milik desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan 2. Pembinaan kelompok seni budaya masyarakat lokal desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Desa, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, serta menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam membangun.

A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber-sumber penerimaan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer berupa Dana Desa droping APBN, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Propinsi, serta Pendapatan Lain-lain berupa bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, bunga bank, hadiah lomba lunas PBB, hadiah lomba dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dana Desa droping APBN adalah penerimaan dari pemerintah pusat yang penggunaannya 100% hanya digunakan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan penyertaan modal desa yang mulai tahun 2018 penggunaan dana tersebut dengan semangat/sistem Padat Karya Tunai di Desa (PKTD).

Pengelolaan penerimaan desa dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel, dalam rangka peningkatan penerimaan desa perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa. Apabila pengelolaan penerimaan dan pembelanjaan tidak dilakukan secara transparan, maka akan menimbulkan masalah hukum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat masih memerlukan anggaran ADD, Bantuan Pemerintah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Dana Desa maupun dana lainnya.

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Desa belum optimal karena usaha-usaha desa dan pengelolaan asset belum dilaksanakan secara maksimal, walaupun dari Pemerintah Desa sudah berupaya mencari trobosan agar PAD lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya..

Pendapatan lain-lain pada setiap tahun hampir sama bahkan cenderung tidak setabil karena tergantung dari situasi dan keadaan perusahaan yang ada serta semangat pemerintah desa dan masyarakat untuk berprestasi dalam perlombaan yang ada dan diikuti, terutama kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan penggunaan ADD di Desa Bunder adalah sebagian besar untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian kecil untuk membiayai Pembangunan fisik.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Sesuai dengan adanya otonomi daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi peluang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja desa merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran desa periode tahun anggaran tertentu. Pengalokasian Belanja Pembangunan Desa dilaksanakan antara lain dengan acuan/rumusan program-program pembangunan hasil musrenbangdes, hasil rumusan dari aspirasi masyarakat dan Arah Kebijakan Pembangunan. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusun strategi maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi serta berdasarkan pada hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kurun waktu enam tahun masa jabatan Kepala Desa. Kebijakan merupakan rumusan keputusan yang digunakan untuk :

- (1) Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan;
- (2) Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan;
- (3) Menciptakan kondisi dimana setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya yang mendapat dukungan untuk mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi Desa Bunder, maka kebijakan-kebijakan pembangunan Desa Bunder tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut :

STRATEGI-KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
A	MISI KESATU	
	1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola	Mengembangkan kemampuan Kepala Desa, Perangkat Desa, Serta Staf dalam mengelola pemerintahan Desa Bunder
	2. Menjalin komunikasi yang baik	Menjalin komunikasi antar lembaga desa serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan serta berupaya mewujudkan program kerja efektif dan efisien
B	MISI KEDUA	
	1. Pemberantasan buta aksara	Mewujudkan pendidikan tingkat dasar atau (pengelolaan PKBM) ditingkat desa

	2. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan sosialisasi edukasi masyarakat
	3. Pelaksanaan kegiatan olahraga	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk giat berolahraga baik tingkat Dusun maupun tingkat desa untuk menciptakan calon atlet yang berprestasi
C	MISI KEEMPAT	
	1. Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk kelompok usaha	Melaksanakan pelatihan pembinaan kelompok usaha atau pelaku UMKM atau industri rumahan serta pemberian stimulant modal
	2. Penerapan teknologi tepat guna	Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam pekerjaan
	3. Pengembangan jaringan pasar	Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam wilayah kegiatan
D	MISI KEEMPAT	
	1. Mengidentifikasi masalah administrasi pertanahan	Mendorong masyarakat untuk mewujudkan administrasi pertanahan
	2. Mengoptimalkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan serta pembinaan masyarakat tentang pembayaran pajak tepat waktu	Melaksanakan pembinaan tentang pembayaran pajak
E	MISI KELIMA	
	Meningkatkan potensi dan	Menjalin kerjasama antar

	kemampuan peran/menjalin hubungan kerjasama serta pemerintah dan pihak lain untuk menunjang pembangunan	pemerintah maupun swasta dalam proses pembangunan untuk peningkatan pendapatan asli desa
F	MISI KEENAM	
	Meningkatkan perilaku Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan masyarakat desa lebih agamis	Melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan ibadah atau pengamalan sesuai dengan keyakinan masing-masing
G	MISI KETUJUH	
	1. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mengembangkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola pemerintahan
	2. Meningkatkan kemampuan Kepala desa dan Perangkat Desa dalam menggunakan teknologi	Mengembangkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola administrasi pemerintahan dengan teknologi
H	MISI KEDELAPAN	
	1. Mengoptimalkan waktu pelayanan kepada masyarakat	1. Memberikan layanan kepada masyarakat di kantor sesuai jam dan hari kerja 2. Pemberian layanan kepada masyarakat di luar jam kerja kantor
	2. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi yang lebih efektif	Mengembangkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola administrasi pemerintahan dengan teknologi yang lebih efektif
H	MISI KESEMBILAN	
	1. Mengidentifikasi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan	Mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha atau ber enterpreuner

	2. Pembinaan kelompok seni budaya masyarakat lokal desa	Mempertahankan tradisi adat pendahulu sesuai dengan peraturan yang ada (nguri-nguri kabudayan jawi)
--	---	---

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut melalui program-program yang sudah direncanakan untuk meneruskan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan demikian program kegiatan merupakan suatu jenis rencana yang disusun secara lebih konkrit dan terkandung berbagai jenis kegiatan untuk menuju misi yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Bunder tahun 2020 – 2025 yang merupakan penerjemahan dari Visi, Misi, Tujuan Strategi, dan Kebijakan pembangunan di atas dirumuskan dalam bentuk pembedaan seperti disajikan pada tabel berikut :

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 - 2025**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

BUNDER
PATUK
GUNUNGKIDUL
D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/manfaat	Waktu pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasam a Antar	Kerjasam a Pihak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																		
				1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	6 paket	Terbayarnya Siltap Kades	√	√	√	√	√	√		300.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				2 Tunjangan Kepala Desa/THR	Desa	6 paket	Terbayarnya Tunjangan Kades	√	√	√	√	√	√		25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																		
				1 Penghasilan Tetap	Desa	6 paket	Terbayarnya Siltap Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√		2.550.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				2 Tunjangan Perangkat Desa/THR	Desa	6 paket	Terbayarnya Tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√		252.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
				1 Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa	Desa	6 paket	Terbayarnya jaminan sosial Kades	√	√	√	√	√	√		132.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				2 Penyediaan Jaminan sosial bagi Perangkat Desa	Desa	6 paket	Terbayarnya jaminan sosial Perdes	√	√	√	√	√	√		192.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)																		
				1 Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√		48.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				2 Perlengkapan alat-alat listrik	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√		12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				3 Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√		12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
				4 Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√		10.800.000	APBDes, APBD, APBN	√					

5	Barang Cetak dan Penggandaan	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
6	Barang Konsumsi	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
7	Penyediaan Honorarium PKPKD	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
8	Penyediaan Honorarium Fungsi Kebendaharaan dan Pembantu Pelaksana Kebendaharaan	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	28.800.000	APBDes, APBD, APBN	√		
9	Penyediaan Honorarium PPKD	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
10	Tenaga Kontrak	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
11	Tunjangan Tenaga Kontrak	Desa	6 paket	Terse diaanya pakain dinas/atribut	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
12	Perjalanan Dinas	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	66.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
13	Operasional perkantoran (Jasa langganan listrik, Langganan air bersih, Langganan surat kabar dan Langganan internet)	Desa	6 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	54.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
5	Penyediaan Tunjangan BPD														
1	Tunjangan BPD	Desa	6 paket	Terbayarnya tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	264.000.000	APBDes, APBD,	√		
1	Tunjangan BPD/THR	Desa	6 paket	Terbayarnya tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	44.000.000	APBDes, APBD,	√		
6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)														
1	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Desa	6 paket	Terse diaanya biaya operasional BPD	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
2	Barang Cetak dan Penggandaan	Desa	6 paket	Terse diaanya biaya operasional BPD	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
3	Barang Konsumsi	Desa	6 paket	Terse diaanya biaya operasional BPD	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
4	Uang Sidang	Desa	6 paket	Terse diaanya biaya operasional BPD	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

			5	Perjalanan Dinas	Desa	6 paket	Tersediaanya biaya operasional BPD	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
			7	1 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	6 paket	Tersediaanya insentif RT/RW	√	√	√	√	√	√	342.000.000	APBDes, APBD,	√			
2 Sarana dan Prasarana Pemerintah an Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan																	
		1	Rak arsip	Desa	1 paket	Tertatanya arsip desa	√	√	√					25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
		2	Filing Cabinet	Desa	1 paket	Tertatanya arsip desa		√	√	√					10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Almari besi	Desa	1 paket	Tertatanya perlengkapan kantor			√	√					30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	2	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 paket	Kenyamaan Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√			150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3		Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa															
		1	Rehabilitasi Kantor Pelayanan Umum	Desa	1 paket	Kantor pelayanan umum lebih nyaman	√								100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	3	2	Pembangunan prasarana kantor ramah penyandang disabilitas	Desa	1 paket	Kantor yang ramah terhadap difabel		√	√						50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Pembangunan/rehabilitasi halaman kantor desa	Desa	1 paket	Halaman kantor yang nyaman		√	√						125.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90		Pengadaan peralatan kerja															
	1	1	Proyektor	Desa	1 ls	Peralatan kerja yang memadai		√							15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Komputer/PC	Desa	1 ls	Peralatan kerja yang memadai	√	√	√						100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Printer	Desa	1 ls	Peralatan kerja yang memadai		√	√	√					20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		5	Kipas angin	Desa	1 ls	Peralatan kerja yang memadai		√	√	√	√				5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		6	AC	Desa	1 ls	Peralatan kerja yang memadai	√	√	√						30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		91		Pengadaan mebeleur															
	1	1	Almari	Desa	1 ls	Tertatanya alat-alat rumah tangga			√						10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Kursi kerja	Desa	1 ls	Tersedianya penunjang kerja			√						7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Kursi tunggu pelayanan	Desa	1 ls	Tersedianya sarana untuk menunggu pelayanan		√	√	√					20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur																
1	1	Jasa perbaikan/service mebeleur	Desa	6 paket	Meubeler yang siap pakai		√	√	√	√	√			5.000.000	APBDes, APBD,	√			

		93	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (mobil)	Desa	6 paket	Memperlancar pelayanan terhadap masyarakat								√	250.000.000	APBDes, APBD,	√			
		94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional													APBDes, APBD,	√			
			1	Rehabilitasi/pemeliharaan motor dinas/operasional	Desa	6 paket	Kendaraan dinas siap pakai	√	√	√	√	√	√			30.000.000	APBDes, APBD,	√			
		95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja																	
			1	Jasa perbaikan/servis komputer	Desa	6 paket	Peralatan kerja yang siap pakai	√	√	√	√	√	√			24.000.000	APBDes, APBD,	√			
			2	Jasa perbaikan/servis peralatan kerja lainnya	Desa	6 paket	Peralatan kerja yang siap pakai	√	√	√	√	√	√			30.000.000	APBDes, APBD,	√			
		96	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Desa	1 paket	Jam masuk yang tercatat dengan tepat		√	√	√					4.000.000	APBDes, APBD,	√			
		97	1	Penyediaan jasa jaminan barang milik desa	Desa	6 paket	Terbayarnya jaminan milik desa	√	√	√	√	√	√			3.000.000	APBDes, APBD,	√			
	3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa	6 paket	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang memadai	√	√	√	√	√	√			3.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√	
		2	1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	6 paket	Dokumen Profil Desa yang akurat dan informatif	√	√	√	√	√	√			42.000.000	APBDes, APBD,	√		√	
		3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa																	
			1	Pendataan dan penataan arsip	Desa	6 paket	Tertatanya arsip desa	√	√	√	√	√	√			12.000.000	APBDes, APBD,	√			
		4	1	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan PencatatanSipil	Desa	6 paket	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	√	√	√	√	√	√			18.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
		5	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	6 paket	Mempermudah dalam membuat kebijakan	√	√	√	√	√				18.000.000	APBDes, APBD,	√			
		90	1	Penyusunan monografi desa	Desa	6 paket	Dokumen monografi desa yang informatif	√	√	√	√	√	√			12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
		91	1	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa	6 paket	Terdatanya RTM dengan benar	√	√	√	√	√	√			21.000.000	APBDes, APBD,	√			
		4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)																
			1	Musdes RKP Desa	Desa	6 paket	Dokumen yang transparan dan partisipatif	√	√	√	√	√	√			48.000.000	APBDes, APBD,	√			
			2	Musrenbangdes RKP Desa	Desa	6 paket	Dokumen yang transparan dan partisipatif	√	√	√	√	√	√			48.000.000	APBDes, APBD,	√			
			3	Musdes APBDes	Desa	6 paket	Dokumen yang transparan dan partisipatif	√	√	√	√	√	√			30.000.000	APBDes, APBD,	√			
			4	Musdes Verval BDT	Desa	6 paket	Dokumen data RTM yang akurat	√	√	√	√	√	√			18.000.000	APBDes, APBD,	√			

2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)																	
1	Musdus RPJMDesa	Desa	6 paket	Terseapnya aspirasi dan usulan masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
2	Musdes RPJMDesa	Desa	6 paket	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan transparan	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
3	Musrenbangdes RPJMDesa	Desa	6 paket	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan transparan	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)																	
1	Penyusunan RPJMDesa	Desa	6 paket	Dokumen perencanaan yang baik dan sistematis	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
2	Penyusunan RKPDesa	Desa	6 paket	Dokumen perencanaan yang baik dan sistematis	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)																	
1	Penyusunan Perdes APBDes	Desa	6 paket	Dokumen keuangan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
2	Penyusunan Perdes Perubahan APBDes	Desa	6 paket	Dokumen keuangan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
3	Penyusunan Perdes Pertanggungjawaban APBDes	Desa	6 paket	Dokumen keuangan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
5	1 Pengelolaan / Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	6 paket	Aset yang terinventarisasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)																	
1	Penyusunan Perdes Pengelolaan Aset Desa	Desa	6 paket	Dokumen peraturan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					
2	Penyusunan Perdes Pemanfaatan Tanah Desa	Desa	6 paket	Dokumen peraturan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√					
3	Penyusunan Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Desa	6 paket	Dokumen peraturan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√					
4	Penyusunan Perdes Pungutan Desa	Desa	6 paket	Dokumen peraturan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√					

7	1	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	6 paket	Informasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
8	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	6 paket	Informasi tentang desa lebih luas	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
9	1	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga, dll)	Desa	2 paket	Terjalin kerjasama yang baik			√			√	2.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)																			
	1	Pelaksanaan Pemilihan BPD	Desa	1 paket	Terpilihnya BPD						√	20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
	2	Pelaksanaan Pilkades	Desa	1 paket	Terpilihnya Kepala Desa						√	90.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	3 paket	Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan		√		√		√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
90	1	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Desa	6 paket	Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
91		Pengisian perangkat desa																			
	1	Pengisian perangkat desa (dukuh Gambiran)	Desa	1 paket	Dukuh Gambiran yang devinitif				√			25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa																			
	1	Penghargaan purna tugas Dukuh Gambiran	Desa	1 paket	Penghargaan Dukuh			√				7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√							
93		Pelaksanaan lomba/ evaluasi perkembangan desa	Desa	1 paket	Terselenggaranya lomba desa			√				200.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
94	1	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Desa	2 paket	Dokumen perencanaan tata ruang		√	√				10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
95		Pengadaan pakaian dinas/seragam																			
	1	Pengadaan PDH (kekhi) kades dan perangkat desa	Desa	3 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes		√		√		√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
	2	Pengadaan Pakaian Batik Gunungkidul kades dan perangkat desa	Desa	3 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes		√		√		√	21.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
	3	Pengadaan Pakaian Putih-Hitam kades dan perangkat desa	Desa	3 paket	Lancarnya beban operasional Pemdes		√		√		√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
96	1	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Desa	6 paket	Pelaksanaan pembangunan sesuai	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√							
5	Pertanahan	1	1	Sertifikasi Tanah Desa	Desa	300 bidang		√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			

			2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	3 paket	Tanah yang teregistrasi/ teradministrasikan		√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			3	1 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	2000 bidang	Terbitnya dokumen Pertanahan milik masyarakat			√					300.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			4	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	3 paket	Masalah pertanahan terselesaikan		√	√		√			5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			5	Penyuluhan Pertanahan	Desa	6 paket	Pemahaman masyarakat tentang pertanahan meningkat	√	√	√	√	√	√		5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	6 paket	PBB yang teradministrasikan	√	√	√	√	√	√		2.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			7	1 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	2 paket	Tertatanya batas tanah dengan benar		√	√					10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			90	1 Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Desa	2 paket	Terpenuhinya pengganti tanah desa			√	√				25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			91	1 Sertifikasi tanah milik desa	Desa	6 paket	Tersertifikatnya tanah milik desa		√	√					20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			92	1 Pengadaan tanah milik desa	Desa	3 paket	Bertambahnya aset tetap desa		√	√					100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			93	1 Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Desa	2 paket	Tidak ada konflik pertanahan			√	√				15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			94	1 Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Desa	6 paket	Pelunasan PBB tepat waktu	√	√	√	√	√	√		24.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
			95	Perapatan patok batas desa	Desa	2 paket	Perapatan patok batas desa			√			√		3.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)															
				1 Honor Guru PAUD dan TK	Desa	6 paket	Terbayarnya honor Guru PAUD dan TK	√	√	√	√	√	√		288.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				2 Operasional PAUD dan TK	Desa	6 paket	Terselenggaranya kegiatan PAUD dan TK	√	√	√	√	√	√		90.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				3 Beasiswa pendidik PAUD	Desa	3 paket	Terselenggaranya pendidik PAUD dan TK yang berkompeten	√	√	√	√	√	√		7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)															
				1 APE luar (Ayunan kereta, Bola dunia, Jembatan goyang)	Desa	6 paket	Tersedianya sarana prasarana PAUD	√	√	√	√	√	√		50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	3 paket	Peningkatan kapasitas pendidikan	√	√	√	√	√	√		10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

4	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 paket	Peningkatan minat baca masyarakat			√						5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	1	Listrik PAUD	Desa	1 paket	Sarana parasana perpustakaan siap pakai		√							2.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	6 paket	Terwujudnya sarana prasarana TPA	√	√	√	√	√	√			84.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa																
	1	Mebelair PAUD (meja anak, kursi anak, almari arsip, loker)	Desa	3 paket	Tersejadinya sarana prasarana PAUD		√							80.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	7	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 paket	Perpustakaan yang lebih representatif		√						25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	8	1	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman	Desa	1 paket	Perpustakaan terkelola dengan lebih baik		√						5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 paket	Terbinanya sanggar seni dan belajar			√					5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	10	1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	2	Meningkatnya motifasi siswa dalam pendidikan		√		√				50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	3 paket	Terwujudnya gedung PAUD/ TK			√					100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	91	91	Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	3 paket	Gedung PAUD/ TK yang nyaman				√				10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	92	92	Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	Desa	1 paket	Meningkatnya motifasi belajar		√						3.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	93	93	Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	Desa	1 paket	Terdatanya warga putus sekolah dan buta		√	√	√	√	√		1.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	94	94	Pembinaan taman bacaan masyarakat	Desa	1 paket	Meningkatnya minat baca	√	√	√	√	√	√		2.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	2	Kesehatan																
	1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	6 paket	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar	√	√	√	√	√	√		30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)															
	1		PMT Lansia	Desa	6 paket	Meningkatka gizi lansia		√	√	√	√	√		72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	2		PMT ibu hamil	Desa	6 paket	Meningkatkan gizi ibu hamil		√	√	√	√	√		42.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	3		Insentif Kader Yandu Balita	Desa	6 paket	Terbayarnya honor Kader	√	√	√	√	√	√		150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	4		Insentif Kader Yandu Lansia	Desa	6 paket	Terbayarnya honor Kader	√	√	√	√	√	√		21.600.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	5		Kelas ibu hamil	Desa	6 paket	Sehatnya ibu mahil		√	√	√	√	√		7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		

	6	Kelas lansia	Desa	6 paket	Sehatnya lasia		√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	6 paket	Terbentuknya Kader kesehatan yang terampil	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
4	1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	6 paket	Lancarnya penyelenggaraan desa siaga	√	√	√	√	√	√	90.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
5		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa	1 paket	Terbentuknya PMR tingkat Desa			√				10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	4 paket	Terbinanya tumbuh kembang balita dan anak	√	√	√	√			24.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
7		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	2 paket	Kesehatan tradisional terlatih		√		√			6.000.000	APBDes, APBD,	√		
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD															
	1	Pemeliharaan sarana prasarana posyandu	Desa	6 paket	Lancarnya penyelenggaraan posyandu	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
9		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	14 paket	Lancarnya penyelenggaraan posyandu	√	√	√	√	√	√	116.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	6 paket	Lancarnya penyelenggaraan Posbindu	√	√	√	√	√	√	37.600.000	APBDes, APBD, APBN	√		
91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Desa	6 paket	Meningkatnya kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Desa	6 paket	Meningkatnya produksi Toga	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD,	√		
93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Desa	6 paket	Pencegahan penyakit	√	√	√	√	√	√	28.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Desa	6 paket	Meningkatkan gizi balita	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	Desa	6 paket	Data kesehatan yang akurat	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD,	√		
96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Desa	7 paket	Kesadaran ber KB meningkat	√	√	√	√	√	√	14.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
97		Surveilans berbasis masyarakat	Desa	3 paket	Kemandirian masyarakat terhadap kasus kesehatan meningkat	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
98		Insentif kader kesehatan/KB	Desa	6 paket	Terbayarnya insentif kader	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes, APBD,	√		
99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	100 Paket	Tersedianya sanitasi yang baik	√	√	√	√	√	√	350.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	3 paket	Jalan yang lebih baik	√	√	√	√	√	√	1.600.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	7 paket	Jalan yang lebih baik	√	√	√	√	√	√	450.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	6 paket	Mempermudah akses ke lahan pertanian	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	1 paket	Kuatnya jembatan			√			√	400.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	15 paket	Prasarana jalan yang baik	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	6	Pemeliharaan Gedung/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 paket	Terwujudnya gedung balai desa	√	√	√	√	√	√	1.500.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	2 paket	Makam/ situs lebih asri		√	√				50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	1 paket	Tidak terjadi kerusakan dini	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	7 paket	Gapura yang baik	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan desa	Desa	7 paket	Sarana jalan yang memadai	√	√	√	√	√	√	3.950.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	6 paket	Mudahnya akses jalan lingkungan	√	√	√	√	√	√	4.000.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa	6 paket	Mempermudah akses ke lahan pertanian	√	√	√	√	√	√	270.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	13	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Desa	1 paket	Jembatan yang lebih kuat dan kokoh	√	√	√	√	√	√	350.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	14	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	6 paket	Sarana jalan yang memadai	√	√	√	√	√	√	7.000.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	7 paket	Terwujudnya Balai yang baik	√	√	√	√	√	√	3.000.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	1 paket	Terwujudnya pemakaman/ situs		√	√	√			100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 paket	Mudah mengenali wilayah dan sebaran kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1 paket	Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan				√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
	19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Desa	1 paket	Berfungsinya kembali embung				√			125.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√

	20	1	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	7 paket	Terseadinya gapura batas Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	560.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√	
	90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampungan air komunal	Desa	1 paket	Terwujudnya penampungan air komunal				√						10.000.000	APBDes, APBD,	√		√	
	91		Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	Desa	1 paket	Tidak terjadi kerusakan dini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD,	√		√	
	92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Desa	6 paket	Terwujudnya pemakaman/situs										375.000.000	APBDes, APBD,	√		√	
4	Kawasan Peremukiman	1	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan	Desa	18 paket	Terseadinya rumah tinggal layak huni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		2	1	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	7 paket	Pemanfaatan sumur resapan lebih optimal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa	7 paket	Menjaga kebersihan air sumur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Desa	7 paket	Lancarnya air bersih ke rumah tangga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		5		Pemeliharaan Sanitasi Peremukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	7 paket	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan, produktivitas masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		6		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa	7 paket	Terpeliharanya jamban umum dan tandon air				√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD,	√		√
		7		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	7 paket	Terkelolanya sampah di Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		8		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	7 paket	Tidak terjadi kerusakan dini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		9		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 paket	Tidak terjadi kerusakan dini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD,	√		√
		10		Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan	Desa	7 paket	Mengurangi pencemaran lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	230.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		11		Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa	7 paket	Terseadinya sumber air bersih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		12		Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Desa	6 paket	Lancarnya aliran air bersih ke rumah tangga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		13		Pembangunan/Rehabilitasi Sanitasi Peremukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	6 paket	Mengurangi pencemaran lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		14		Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)	Desa	4 paket	Mempermudah akses mck bagi pendatang		√	√	√						20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		15		Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	4 paket	Meningkatnya kemampuan pengelola bank sampah		√	√	√						150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√

		16	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	6 paket	Terciptanya sistem pembuangan air limbah	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		17	Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	8 paket	Terseadinya area bermain	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		90	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Desa	1 paket	Terseadinya pengelolaan air bersih	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		91	Pemberian stimulan jamban sehat	Desa	70 paket	Terseadinya jamban sehat bagi RTM	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		92	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Desa	7 paket	Kesehatan masyarakat meningkat	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		93	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Desa	7 paket	Meningkatnya perilaku hidup sehat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		94	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Desa	7 paket	Sampah terpilah dengan baik		√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1					√	√	√	√	√	√		APBDes, APBD, APBN	√		√
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	6 paket	Mempermudah masyarakat mendapatkan ikan		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	1 paket	Kesadaran masyarakat tentang LH dan Kehutanan meningkat			√		√		10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Desa	1 paket	Lancarnya sumber daya air	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		92	Rehabilitasi kawasan/ lahan kritis desa	Desa	3 paket	Terjagannya populasi tanaman hutan			√	√	√		8.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		93	Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan	Desa	7 paket	Kapasitas kelompok meningkat		√	√				5.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		94	Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	Desa	1 paket	Kapasitas kelompok meningkat		√					7.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	7 paket	Mengurangi resiko kecelakaan dan tersesat		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	7 paket	Mempermudah mendapatkan informasi desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika	Desa	7 paket	Mempermudah komunikasi	√	√	√	√	√	√	55.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		91	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	Desa	105 titik	Jalan lebih terang	√	√	√	√	√	√	31.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	2 paket	Meningkatnya pemahaman masyarakat		√	√				20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	2 paket	Meningkatnya pemahaman masyarakat		√	√				20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	Desa	2 paket	Meningkatnya pemahaman masyarakat			√	√			20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	2 paket	Obyek wisata yang nyaman	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD,	√		√
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	2 paket	Meningkatkan ekonomi masyarakat	√	√	√	√	√	√	145.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
				3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	2 paket	Meningkatkan ekonomi masyarakat	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
				90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Desa	2 paket	Meningkatkan ekonomi masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD,	√		√
				91	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Desa	2 paket	Meningkatnya jumlah wira usaha							35.000.000	APBDes, APBD,	√		√
		1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)	Desa	6 paket	Tempat koordinasi petugas ronda						200.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√	
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	6 paket	Linmas yang terlatih	√	√	√	√	√	√	59.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa	6 paket	Terkoordinasinya tenaga keamanan dan perlindungan masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	7 Paket	Masyarakat siap menghadapi bencana	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	7 Paket	Memudahkan koordinasi terhadap kejadian bencana		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD,	√		
				6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1 paket	Akses pendampingan hukum#	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD,	√		
				7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	6 paket	Masyarakat yang sadar hukum	√	√	√	√	√	√	15.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Desa	6 paket	Masyarakat siap menghadapi bencana	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD,	√		
				91	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Desa	6 paket	Terpenuhiya peralatan kamtibmas	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD,	√		
				92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Desa	7 paket	Ke siapsiagaan menghadapi bencana		√	√				40.000.000	APBDes, APBD,	√		
				93	Pembinaan Jaga Warga	Desa	6 paket	Terbinanya forum jaga warga	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD,	√		
				94	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Desa	6 paket	Terwujudnya desa bebas narkoba	√	√	√	√	√	√	62.000.000	APBDes, APBD,	√		
				95	Pengadaan seragam Satlinmas	Desa	7 paket	Linmas yang lebih rapi		√	√		√		21.000.000	APBDes, APBD,	√		
				96	Pembinaan dan pengembangan paralegal desa	Desa	7 paket	Paralegal yang kompeten		√	√		√		5.000.000	APBDes, APBD,	√		
97	Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	Desa	7 paket	Kadarkum yang tangguh		√	√		√		20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√						
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	7 paket	Meningkatnya kemampuan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	√	√	√	√	√	485.000.000	APBDes, APBD, APBN	√					

		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	6 paket	Keterwakilan mengikuti lomba	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	7 paket	Lestariya adat tradisi	√	√	√	√	√	√	210.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa	7 paket	Terpenuhinya sarana prasarana kebudayaan milik Desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Desa	7 paket	Terlaksananya kegiatan keagamaan		√	√	√	√	√	86.000.000	APBDes, APBD,	√		
		91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Desa	7 Paket	Aktifitas sosial dan agama seimbang		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Desa	6 paket	Lestariya adat tradisi	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDes, APBD,	√		
		93	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Desa	6 paket	Terbinanya sanggar seni dan belajar	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD,	√		
		94	Pelaksanaan sunatan massal	Desa	6 paket	Terbantuanya warga kurang mampu		√		√			50.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		95	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Desa	6 paket	Terbinanya lembaga pelestari adat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		96	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Desa	6 paket	Desa budaya yang baik	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	6 paket	Meningkatkan prestasi pemuda	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	6 paket	Meningkatnya wawasan kepemudaan/ kebangsaan	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	6 paket	Terpantaunya atlet berbakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD,	√		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	6 paket	Mencegah kerusakan dini sarana prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD,	√		√
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Desa	6 paket	Nyamanya sarana prasarana olahraga	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	6 paket	Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga lebih maju	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Desa	6 paket	Meningkatkan nasionalisme	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD,	√		
		93	Operasional Karang Taruna	Desa	6 paket	Lancarnya kegiatan karang taruna	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Desa	6 paket	LPMP/LPMD yang kompeten	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

				3	Pembinaan PKK	Desa	6 paket	PKK yang kompeten	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDes, APBD,	√		
				4	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	6 Paket	Terbinanya lembaga kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	23.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				90	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Desa	1 paket	Terbentuknya LKD						√		10.000.000	APBDes, APBD,	√		
				91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa	6 paket	Terbinanya KPM	√	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDes, APBD,	√		
				92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa	6 paket	Kemiskinan di desa terpetakan	√	√	√	√	√	√	√	32.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				93	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa	6 paket	Meningkatnya kebersihan lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				94	Pembinaan RT/RW	Desa	6 paket	Terbinanya RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD,	√		
				95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Desa	6 paket	Lancarnya kegiatan LPMD	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	APBDes, APBD,	√		
				96	Operasional PKK	Desa	6 paket	Lancarnya kegiatan PKK	√	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD,	√		
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1 Kelautan dan Perikanan		1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	3 paket	Terpeliharanya Kolam Perikanan Darat Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	3 paket	Terpeliharanya Kolam Perikanan Darat Milik Desa	√	√	√	√	√	√	√	37.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	7 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bibit/pakan	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Desa	1 paket	Terpenuhinya SDM bidang Perikanan	√							6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				90	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	Desa	1 paket	Terlatihnya SDM untuk Pengolahan hasil perikanan	√							10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
				94	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif		6 paket	Terseadinya SDM dan pakan ikan alternatif untuk perikanan	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2 Pertanian dan Peternakan		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa	6 paket	Terseadinya Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
				2	Pembangunan unit pengolahan pupuk	Desa	1 paket	Terseadinya unit pengolahan pupuk				√	√	√	80.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
				3	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	1 paket	Meningkatnya Produksi Peternakan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			
				4	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa	1 paket	Terpenuhinya Ketahanan Pangan tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√			

	5	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	1 paket	Tersedianya Saluran Irigasi Sederhana yang memadai	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	1 paket	Terkelolanya Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	90	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	Desa	1 paket	Tersedianya Saluran Irigasi Sederhana yang memadai	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Desa	6 paket	Terkelolanya hasil pertanian/peternakan	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Desa	6 paket	Gapoktan lebih maju	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	93	Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	Desa	6 paket	Tersedianya lumbung desa		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	94	Pemeliharaan lumbung desa	Desa	6 paket	Terpeliharanya lumbung desa dari kerusakan		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	95	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Desa	6 paket	Terciptanya SDM pengembangan pupuk yang profesional		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
	96	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/ alternatif	Desa	6 paket	terciptanya SDM pengembangan pakan ternak organik/ alternatif yang profesional							10.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 paket	Meningkatkan kapasitas Kepala Desa yang profesional	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	6 paket	Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa yang profesional	√	√	√	√	√	48.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	6 paket	Meningkatkan kapasitas BPD yang profesional		√	√	√	√	25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	6 paket	Terciptanya SDM Pemberdayaan Perempuan yang profesional	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	6 paket	Terciptanya SDM bidang Perlindungan anak yang profesional	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa	6 paket	Terciptanya SDM bagi penyandang Difabel yang profesional	√	√	√	√	√	26.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Desa	6 paket	Anak lebih nyaman dalam beraktifitas	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

		91	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa	6 paket	Terbinanya Gerakan Sayang Ibu (GSI)	√	√	√	√	√	√	21.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Desa	6 paket	Terciptanya Forum Anak Desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		94	Pembinaan ketahanan keluarga	Desa	6 paket	Terbinanya Ketahanan Keluarga	√	√	√	√	√	√	17.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Desa	6 paket	Terbinanya kelompok rentan	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		96	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Desa	6 paket	Terbinanya remaja dalam pengetahuan Reproduksi remaja	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		97	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	Desa	6 paket	pengecehan perdagangan manusia	√	√	√	√	√	√	14.500.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		98	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Desa	6 paket	Mencegah tindakan KDRT	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		99	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Desa	6 paket	Terbinanya pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	6 paket	Koperasi/ UMKM yang baik			√	√	√	√	36.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	6 paket	Sarana Prasarana Koperasi/UMKM yang memadai	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	6 paket	Terseadinya Teknologi Tepat Guna Pengembangan Ekonomi Desa Non Pertanian	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Desa	6 paket	Kegiatan Promosi UMKM yang baik	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Desa	6 paket	Terseenggaranya promosi produk usaha masyarakat	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	6 paket	Pengelola BUMDesa yang profesional	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Desa	1 paket	Terseadinya gedung kantor BUM Desa				√			100.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 paket	Pasar yang nyaman					√	√	200.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa	1 paket	Terbentuknya Kelompok Usaha Ekonomi yang produktif		√		√		√	300.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		90	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	Desa	1 paket	Terbinanya pedagang di lingkungan Pasar Desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		

			91	Pengelolaan pasar desa	Desa	1 paket	Terkelolanya kios Desa	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes, APBD	√		
V	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	1	Penanggulan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 paket	Tertanggulangnya bencana alam	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		2	Keadaan Darurat	2	Keadaan Darurat	Desa	1 paket	Tertanggulangnya bencana sosial	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
		3	Keadaan Mendesak	3	Keadaan Mendesak	Desa	1 paket	Tertanggulangnya kejadian luarbiasa/ wabah	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		
VI	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1	Penyertaan Modal BUMDesa	Desa	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan modal	√	√				300.000.000	APBDes, APBD, APBN	√		√	

BAB VII PENUTUP

A. Program

RPJM-Desa ini memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum dan program pelayanan terhadap masyarakat serta RPJM-Desa ini juga merupakan arah kebijakan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas kegunaan dengan tidak mengesampingkan aspirasi atau usulan dari masyarakat dan berkesinambungan program, sehingga diharapkan RPJM-Desa ini juga memuat hal-hal yang menjadi rencana/program sebagai pedoman pembangunan selanjutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tahap-tahap penyusunan RPJM-Desa ini berlangsung selama tiga bulan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus membentuk tim penyusun RPJM-Desa.
- 3) Pengkajian keadaan Desa dan penyiapan Gambaran awal seperti Visi dan Misi Desa dalam pembangunan;
- 4) Penggalan usulan/gagasan program-program pembangunan di masing-masing Padukuhan melalui musyawarah padukuhan (Musdus) yang dihadiri oleh Dukuh, perangkat padukuhan, serta masing-masing perwakilan utusan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di tingkat padukuhan;
- 5) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat termasuk pengkajian isu-isu potensi dan masalah Desa, termasuk ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
- 6) Penyusunan rancangan RPJM-Desa dengan menyelaraskan arah kebijakan pemerintah desa, pengkajian keadaan desa dan pembahasan serta pengolahan hasil penggalan gagasan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
- 7) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 8) Penyajian naskah rancangan RPJM-Desa untuk dibahas dalam Musyawarah BPD pada tahap awal;
- 9) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- 10) Setelah mendapat persetujuan BPD pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diatas, maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala

Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Selanjutnya RPJM-Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan di Desa Bunder selama 6 (enam) tahun ke depan melalui program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

DAFTAR HADIR

Rapat /Sidang Bersama Pemerintah Desa dan BPD

Hari/tgl : Senin/30 Maret 2020
 Acara : Rapat /Sidang Bersama Pemerintah Desa dan BPD tentang RPJMDesa
 Tahun 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Matyadi	Kades	Matyadi
2	Sidik Hermawan	Carik Bandar	Sidik Hermawan
3	Suyadi	BPD	Suyadi
4	Wahyu Setiawan	Kaur TV	Wahyu Setiawan
5	Jombidi	Dukuh	Jombidi
6	Sekijem	Dukuh	Sekijem
7	ingi Kusuma	Dukuh	ingi Kusuma
8	Suhardi	Dukuh	Suhardi
9	Schermah	Pre.	Schermah
10	Suprpto	STF	Suprpto
11	Siti Nur W.	Bendahara	Siti Nur W.
12	Eti S.	staf	Eti S.
13	Ety Pramestya	BPD	Ety Pramestya
14	SULANTA	BPD	Sulanta
15	Anisa - M.	BPD	Anisa - M.
16	Irena Sholihah	BPD	Irena Sholihah
17	Yubhisra	- - -	Yubhisra
18	ParDiman	"	ParDiman
19	Yeni. L	- - -	Yeni. L
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			

Ketua BPD Bunder

SUYADI

Kepala Desa Bunder

MARYADI